

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena relawan politik sebagai bentuk demokrasi partisipatoris dalam kontestasi Presidensial 2014 dianggap sebagai wujud bahwa kemenangan Jokowi-JK adalah kemenangan rakyat Indonesia. Fenomena ini memiliki efek dan pengaruh yang signifikan terhadap kontestasi Presidensial di Indonesia, terutama pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan 2019. Penelitian ini menganalisis sepaik terjang relawan politik yang awalnya hanya sebagai kelompok masyarakat yang tergerak untuk mendukung Partai Politik atau bakal calon yang dipandang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, kemudian berbalik menjadi kekuatan politik baru. Penelitian ini juga menganalisis implikasi dari kemunculan relawan politik sebagai kekuatan politik baru terhadap Partai Politik sebagai lembaga yang memiliki legitimasi formal untuk memperebutkan kekuasaan dan mengisi jabatan politik.

Hampir satu dekade terakhir kampanye dalam kontestasi politik tidak hanya diramaikan oleh keberadaan kandidat/calon, Partai Politik, atau tim kampanye melainkan diisi pula oleh kehadiran kelompok sipil pendukung salah satu calon yang mengorganisir diri dalam bentuk relawan. Istilah relawan (*volunteer*) dalam historiografi politik dikembangkan semenjak tahun 1755 oleh seorang Perancis M. Fr Voluntaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang

berperang. Istilah relawan diambil dari bahasa Jerman "*aktivismus*" yang muncul pada akhir perang dunia pertama. Istilah ini kemudian digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Biasanya *aktivismus* dihubungkan dengan Kurt Hiller, pengarah organisasi *Neuer Club* yang menaungi para penyair ekspresionis awal, maupun Franz Pfemfert, pendiri majalah *Die Aktion* pada 1911 yang sangat politis. Dalam berbagai pengertian tersebut, kaum militan maupun *aktivismus* akhirnya dapat dikatakan sebagai bagian dari relawan (*volunteer*) (Heryanto, 2019: 159).

Relawan politik dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan, kelompok kepentingan seringkali di definisikan sebagai "*a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests*" (Benditt, 1975:34). Berdasarkan definisi tersebut, fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisir yang memiliki tujuan bersama secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry, & Goldman, 1997). Dengan kata lain, tujuan dari kelompok kepentingan hanyalah berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Selain sebagai kelompok kepentingan, relawan politik juga dapat dikategorikan sebagai kelompok penekan. Kelompok penekan adalah "*A pressure group is an organized social interest group formed solely to pursue its objectives/interest and influence government policies. The main aim or objective*

of any social interest group is not to take over state power but to influence government machinery to its own advantage". Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kelompok penekan merupakan kelompok kepentingan sosial yang terorganisir yang dibentuk semata-mata untuk mengejar tujuan/kepentingan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tujuan atau sasaran dari kelompok kepentingan ini adalah tidak untuk meraih jabatan-jabatan publik, namun hanya untuk kemajuan mereka dengan mempengaruhi mesin pemerintahan itu sendiri (Anifowose & Enemu, 1999).

Dalam konteks Indonesia puncak popularitas relawan politik terjadi pada Pilpres Tahun 2014, peran relawan Jokowi berhasil mengantarkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres Tahun 2014. Namun, kehadiran relawan politik pada kontestasi presidensial Tahun 2014 berbeda dengan sejarah awal kelahiran voluntarisme tersebut. Sebab relawan politik pada kontestasi presidensial Tahun 2014 bukan bagian dari anggota Partai Politik. Para relawan hadir bukan karena daya tarik pada salah satu Partai Politik, melainkan kepada politik nilai yang ingin diperjuangkan melampaui kepentingan Partai Politik.

Dalam banyak hal, kelahiran relawan politik hampir mirip dengan Partai-Partai Politik. Hanya saja Partai Politik lebih diorientasikan pada upaya untuk memenangkan suara pemilih dan menduduki jabatan-jabatan dalam kekuasaan. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan fungsi dari Partai Politik, adalah : Pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia. Kelima, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai Politik sebagai *“any political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public offices”*. Partai Politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan (Sartori 1984:64).

Penempatan elit relawan politik pada jabatan tertentu seperti Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga jabatan Menteri dapat menjelaskan bahwa relawan politik hari ini berperan sebagai pijakan untuk mengisi jabatan politik, layaknya tujuan sebuah Partai Politik. Hal ini dapat dilihat pasca Pilpres Tahun 2014, beberapa nama yang dianggap memiliki peran penting dalam kemenangan pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapatkan jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya : (1) Hilmar Farid, adalah seorang yang dikenal sebagai budayawan dan sejarawan merupakan salah satu elit relawan politik Jokowi yang mendapatkan jabatan sebagai Komisaris

Independen di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebelumnya ia merupakan Ketua Panitia Simposium Sekretariat Nasional Jokowi. Dia juga mendukung Jokowi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 dengan mendirikan Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB). (2) Dyah Kartika Rini, merupakan pendiri Jokowi Ahok Social Media Votunteers (JASMEV), jaringan relawan Jokowi saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dan berlanjut sebagai relawan politik pada kemenangan Pilpres 2014. Pasca kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 dia mendapatkan jabatan di salah satu perusahaan plat merah sebagai Komisaris Independen PT Danareksa (Persero) sejak Oktober 2015. Selain Hilmar Farid yang memiliki latar belakang dari relawan Seknas Jokowi dan Dyah Kartika Rini dengan latar belakang dari relawan JASMEV beberapa elit relawan lainnya juga mendapat bagian untuk duduk di kursi Komisaris BUMN, diantaranya :

Tabel 1.1 Relawan Jokowi-JK di Kursi Komisaris BUMN

NO	NAMA	LATAR BELAKANG RELAWAN	POSISI
1	Paiman Rahardjo	Rumah Koalisi Indonesia Hebat	Komisaris Perusahaan Gas Negara
2	Pataniari Siahaan	Tim Cemara 19	Komisaris Independen BNI
3	Goei Siauw Hong	Pro Jokowi (Projo)	Komisaris Bank Mandiri
4	Hironimus Hilapok	Duta Jokowi	Komisaris Independen Adhi Karya

Sumber : Olahan data peneliti, 2023

Tidak berhenti pada posisi Komisaris BUMN, pasca Pilpres 2019 elit relawan politik Pro-Jo berhasil duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada tanggal 25

Oktober 2019 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 ketua umum Pro-Jo Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada *reshuffle* atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 17 Juli 2023 dua elit relawan politik kembali mendapatkan posisi, dimana Budie Arie Setiadi yang semula menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi resmi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johny G Plate dari Partai Nasdem yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan BTS 4G. Elit relawan politik lain yakni Paiman Raharjo yang merupakan ketua umum Relawan Sedulur Jokowi juga mendapatkan posisi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggantikan Budi Arie Setiadi ketua umum Pro-Jo.

Relawan politik sejatinya memiliki tugas utama meneliti sebab-akibat dari kinerja kebijakan dan program publik, sehingga relawan politik dapat terus mengawal apakah suatu kebijakan publik yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang atau hanya diputuskan sepihak untuk memenuhi kepentingan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap berada pada posisi ektra-parlementer sebagai pengawas dan penyeimbang. Apabila relawan politik memiliki peran ganda sebagai intra-parlementer dan sekaligus ekstra-parlementer akan menjadi problematika di masa yang akan datang, karena pada hakikatnya peran relawan politik adalah pengawal suara rakyat.

Peran ekstra-parlementer relawan politik yang memiliki tujuan sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap kekuasaan Negara atau pemerintah dapat menghasilkan beberapa hal diantaranya; Pertama, mempengaruhi (*influencing*) proses pelaksanaan kebijakan publik. Kedua, mengawasi (*monitoring*) proses pelaksanaan kebijakan publik. Ketiga, memberikan penilaian (*evaluating*) pelaksanaan kebijakan publik. Keempat, memberikan bantuan dan pembelaan (*advocacy*) terhadap kelompok-kelompok yang dirugikan atas pelaksanaan kebijakan publik (Fikri, 1999).

Demokrasi dan Partai Politik memiliki hubungan yang erat, karena Partai Politik adalah pilar dari sistem demokrasi. Partai Politik memiliki peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan Negara (*the state*) dengan warga Negeranya (*the citizen*) (Asshiddiqie, 2007). Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik yang kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2008: 403).

Fenomena voluntarisme yang berkembang pesat pasca Pilpres 2014 menjadi momentum bagi Partai Politik untuk terus melakukan penguatan kelembagaanya. Bagaimanapun Partai Politik merupakan pilar demokrasi. Bahkan menurut Schattscheider (1942) dalam Asshiddiqie "*Political Parties Created Democracy*",

Partai Politik yang membentuk demokrasi bukan sebaliknya (Asshiddiqie, 2007: 710).

Munculnya fenomena voluntarisme merupakan tanda betapa menguatnya demokrasi partisipatoris di Indonesia. Kedepan kehadiran relawan politik dapat disinergikan dengan Partai Politik untuk saling menguatkan, Partai Politik hadir sebagai kekuatan sekaligus pilar demokrasi sementara relawan politik hadir sebagai partisipasi politik publik.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti ingin meneliti mengenai relawan politik yang memilih sikap aktif pasca kontestasi presidensial terlebih menjalankan tugas dan fungsi layaknya Partai Politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik.

Peneliti mengambil relawan politik Pro-Jo sebagai studi kasus. Pro-Jo merupakan kelompok relawan yang memilih tidak membubarkan diri pasca kontestasi presidensial 2014 dan memilih mengubah status organisasinya menjadi organisasi massa (ormas). Sebagai sebuah ormas, Pro-Jo berhasil mengantarkan ketua umunya Budie Arie Setiadi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Penelitian ini lebih terfokus pada analisis relawan politik Pro-Jo, yang berdasarkan pada hasil analisa wawancara mendalam, sehingga konklusi yang dihasilkan oleh penelitian ini tidak terbatas pada analisa penulis belaka. Namun berdasar pada kenyataan dan pendapat para praktisi, pengamat politik, maupun

masyarakat di lapangan. Yang pada akhirnya penelitian ini dapat berguna bagi kemanfaatan bersama, karena memiliki akurasi data yang akurat.

Dalam setiap karya ilmiah, tentu keberadaan teori menjadi sangat fundamental, dikarenakan teori-teori inilah yang nantinya menjadi landasan dan kerangka berpikir dalam melihat permasalahan, serta lebih jauh lagi dapat membuat kesimpulan dan solusi.

Berbagai teori digunakan sebagai acuan berpikir pada penelitian kali ini, mulai dari teori kelompok kepentingan, teori kelompok penekan, teori Partai Politik, dan teori sistem politik yang pastinya menyesuaikan dengan realita di lapangan, khususnya perpolitikan bangsa Indonesia.

Sebuah karya ilmiah pastinya harus memenuhi dua persyaratan utama yakni logika dan faktisitas. Teori bukanlah sebuah harga mati, karena melihat dari perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan, sebuah teori ataupun ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan dalam berbagai karya ilmiah, termasuk penelitian kali ini terjadi sebuah falsifikasi, atau setidaknya pengembangan terhadap teori yang telah ada.

Penjelasan berbagai teori di dalam penelitian ini, baik itu teori kelompok kepentingan, teori kelompok penekan, teori Partai Politik, dan teori sistem politik terdapat dalam sub-bab kerangka pemikiran di dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut yang dianggap sesuai dan dirasa dapat dijadikan landasan berpikir dalam penelitian kali ini.

Dengan karya ilmiah yang berjudul **“Relawan Politik Sebagai Kekuatan Politik Baru dalam Kontestasi Presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019 (Studi Kasus : Relawan Politik Pro-Jo)”**, berbagai teori tersebut dirasa mampu menjawab berbagai persoalan empirik yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini bisa melihat tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh relawan politik yang masih aktif pasca kontestasi presidensial berlangsung. Apakah tindakan relawan politik Pro-Jo yang berhasil mengantarkan ketua umumnya menduduki jabatan politik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika masih dalam batasan tujuan dibentuknya sebuah relawan politik. Jawaban tersebut bisa ditemui di akhir penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai relawan politik. Mulai dari Purboningsih (2015) yang sepakat bahwa relawan politik adalah gerakan voluntarisme yang bergerak di bidang sosial politik. Arianto (2014) dan Syauket (2022) menyebutkan hadirnya relawan politik mengubah nilai politis bernuansa patrimonial dan oligarkis menuju voluntarisme dan partisipatoris. Tidak berhenti hanya sebagai voluntarisme Hamdani, Herdiansyah, dan Bintari (2021) memandang relawan politik menjadi penting dalam melakukan peningkatan partisipasi politik, ditengah tren meningkatnya angkat golput. Hal ini sejalan dengan (Surbakti, 1992: 141) yang menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Kehadiran relawan politik disebut Arianto (2019) karena adanya kebosanan masyarakat terhadap lemahnya rekrutmen Partai Politik. Masyarakat jarang atau bahkan tidak terlibat dalam proses kandidasi yang dilakukan, kandidasi yang selama ini dilakukan Partai Politik tidak demokratis (Sukmajati,2016). Sementara, Jati (2016) menyampaikan voluntarisme politik sebagai perubahan masyarakat menjadi pelaku politik ekstra parlementer dan mempengaruhi konstestasi politik.

Apa yang disampaikan Purboningsih (2015), Arianto (2014), Syauket (2022), Hamdani, Herdiansyah, dan Bintari (2021), Arianto (2019), Sukmajati (2016), dan Jati (2016) cukup kontributif untuk menggambarkan pentingnya relawan politik di Indonesia. Namun demikian, dari penelitian yang ada belum banyak peneliti temui yang membahas relawan politik sebagai kekuatan politik baru dan disinsentif terhadap politik kepartaian. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena awalnya relawan politik sebagai kelompok masyarakat yang tergerak untuk mendukung Partai Politik atau bakal calon yang dipandang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi kemudian menjadi kompetitor Partai Politik utamanya dalam memperebutkan kursi jabatan politik termasuk posisi sebagai Menteri. Sehingga peneliti dapat mengatakan bahwa penelitian kali ini memiliki nilai *novelty* atau kebaruan, sebagai sebuah kajian akademis.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian karya tulis ilmiah kali ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana relawan politik dalam kontestasi Presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019 berkembang menjadi kekuatan politik baru?
2. Bagaimana implikasi keberadaan relawan politik sebagai kekuatan politik baru dalam konteks disinsentif politik kepartaian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran relawan politik dalam kontestasi Presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019
2. Menganalisis implikasi dari keberadaan relawan politik sebagai kekuatan politik baru terhadap disinsentif politik kepartaian

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini dapat berguna untuk memperkuat dan mengembangkan teori-teori mengenai praksis politik, utamanya relawan politik sebagai kekuatan politik baru dan menjadi pijakan untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Pemahaman peneliti tentang latar belakang terbentuknya teori, serta konstruksi pemikiran inti teori yang dipakai dalam penelitian ini, menjadikan hasil penelitian yang dapat menjelaskan kesesuaian teori dengan keadaan politik kontemporer. Apabila terdapat ketidaksesuaian teori dengan praksis di lapangan, maka penelitian ini mampu menjadi sebuah kritik dan saran, guna mengembangkan teori sebelumnya. Bahkan dimungkinkan untuk menciptakan sebuah teori baru. Yang pada akhirnya dapat memberi kebermanfaatan bagi khasanah dunia ilmu pengetahuan.

Secara praktis terdapat beberapa manfaat, diantaranya : (1) Bagi relawan politik, hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan pertimbangan apakah dibentuknya relawan politik diorientasikan pada upaya menduduki jabatan politik. Apakah relawan politik dibentuk sebagai wadah demokrasi partisipatoris dalam kontetasi Pilpres dan sebagai pengawas hingga penyeimbang terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (2) Bagi Partai Politik, hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi terhadap eksistensi Partai Politik sebagai sebuah wadah yang diatur oleh konstitusi dalam kontestasi Pilpres, dan menjadi evaluasi terhadap Partai Politik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa Partai Politik merupakan satu-satunya lembaga yang sah dalam menempatkan kadernya untuk mengisi jabatan politik. (3) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan meneliti. Serta dapat digunakan apabila kelak memutuskan terjun ke dunia politik sebagai pengamat, pengajar maupun praktisi. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi untuk memahami lebih dalam mengenai realitas-realitas politik, utamanya dalam melihat relawan politik sebagai sebuah kekuatan politik baru.

1.5 Tinjauan Pustaka

Keberadaan voluntarisme merupakan bentuk kegiatan kesukarelawanan, yang sedang berlangsung, terencana, dan tindakan yang secara bebas dipilih untuk mempromosikan kepentingan publik. Perilaku pro sosial yang

diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberi manfaat bagi orang lain, yang tidak membutuhkan kompensasi keuangan (Clary, et al., 1998: 1516-1530 ; Mowen & Sujan, 2005: 170-182 ; Penner, 2002). Dalam konteks informal relawan menitikberatkan pada kegiatan disposisi seperti menolong atau berempati (Finkelstein & Brannick, 2007).

Karakteristik kelompok relawan informal dalam lingkungan sosial kemasyarakatan terjadi berdasarkan pengorganisasian kasual yang sering kali berasal dari ikatan hubungan yang kuat (Amato, 1990). Berdasarkan sifatnya yang informal jumlah sukarelawan hanya dapat diperkirakan, karena beberapa bentuk kegiatan sukarela tidak dilembagakan. Keterlibatan relawan sejatinya tidak berkuat pada kegiatan kemanusiaan semata dalam mencapai kesejahteraan bersama. Sejatinya setiap masyarakat yang dibentuk senantiasa bertindak untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang mereka anggap baik.

Voluntarisme merupakan upaya membangun koneksi antar warga Negara dengan konsep kewarganegaraan aktif. Target mereka bukan untuk menumbuhkan hak sipil tetapi untuk merangsang aktivitas sosial (Pecnikova, 2016: 1238). Relawan jenis ini bergerak meliputi beberapa indikator dari kesukarelaan, yakni : perilaku berkehendak bebas, tanpa imbalan, bertujuan membantu orang lain atau penerima manfaat, dan atas dasar jangka panjang pengaturan informal (Levanthal, 2009).

Basis kekuatan voluntarisme yang disandarkan pada kedekatan emosional dengan modal sosial yang kuat, menghasilkan komposisi keanggotaan relawan

politik yang biasanya terdiri dari unsur-unsur diluar Partai Politik, sebagai gerakan politik non elitis, non partisan, berdaya secara mandiri, dan bergerak secara masif dan dinamis, dengan satu karakter utamanya : mampu berpartisipasi secara politik tanpa Partai Politik (Alam, Arditama, & Sefyono, 2017: 141-142). Peningkatan peran relawan bukan dari anggota formal Partai Politik telah memberikan efek untuk menghasilkan kampanye yang kuat. Hal ini dikarenakan keberadaan relawan non anggota Partai Politik dapat terbentuk dari beraneka ragam latar belakang, demi tercapainya keseimbangan dalam kegiatan kesukarelawanan (Fisher, Fieldhouse, & Cutss, 2014: 77-85).

Keberadan relawan politik merupakan adanya pergeseran cara pandang untuk meninggalkan cara-cara kampanye tradisional seperti penyebaran poster, selebaran, dan pembuatan baliho-baliho di ruang-ruang publik yang bersifat umum. Kampanye model tradisional tersebut justru tidak menyentuh *voters* secara keseluruhan. Perkembangan teknologi dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan cara-cara kampanye tradisional, yang dinilai menghasilkan pembiayaan yang tinggi saat Pemilu. Menggerakkan kader-kader Partai Politik mengharuskan Partai Politik memberikan kebutuhan logistik pada proses tahapan-tahapan Pemilu (Fisher & Denver, 2009: 196-210).

Beban biaya yang terlalu berat untuk dipikul oleh Partai Politik dalam kampanye tradisional, menciptakan ruang baru untuk melibatkan masyarakat dalam mempromosikan pembangunan masyarakat sipil. Tanpa mereka harus

bergabung sebagai anggota formal Partai Politik atau menaggung stigma-stigma negatif publik atas Partai Politik (Lay, 2017: 9-10).

Pembahasan tentang relawan politik pada umumnya menyoroti relawan politik sebagai gerakan sosial politik yang bersifat partisipatoris. Purboningsih (2015), Arianto (2014), Syauket (2022), Jati (2016), Hamdani, Herdiansyah, dan Bintari (2021) yang menyebutkan bahwa relawan politik hadir sebagai bentuk dari peningkatan partisipasi politik oleh publik. Latarbelakang terbentuknya relawan politik dipicu oleh kesamaan kekaguman terhadap tokoh terkait, baik dilihat dari program kerja ataupun dari visi misi tokoh tersebut. Relawan Politik sebagian besar berasal dari kelas menengah urban yang kritis terhadap politik, transformasi kelas menengah menjadi kelas politis merupakan bagian untuk meruntuhkan hegemoni elite yang selama ini berkuasa di pemerintahan. Fenomena relawan politik dalam kontestasi Presidensial dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuansa patrimonial, oligarkis, menuju voluntarisme dan partisipatoris.

Arianto (2016) membagi tipologi relawan politik yaitu relawan komunitas yang terorganisir serta memiliki struktur dan relawan non komunitas yang bergerak secara personal. Sementara, Maharddhika (2017) menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai relawan politik menjadi 2 jenis yaitu partisan dan non partisan yang keduanya dibedakan berdasarkan relasi dengan kandidat. Non partisan dimaknai sebagai relawan yang tidak terlibat dalam kemenangan

kandidat, sedangkan partisan adalah relawan yang terlibat aktif dalam upaya pemenangan kandidat.

Putra, Hertanto, dan Warganegara (2022) memaknai bahwa relawan politik tidak hanya sebatas peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk voluntarisme dan partisipatoris, tetapi juga bentuk pragmatisme dari adanya kebutuhan tokoh politik terhadap jasa marketing politik yang ditawarkan relawan politik guna memaksimalkan potensi pemenangan. Relawan politik juga dianggap berperan sebagai broker dalam relasi klientelistik dengan kandidat guna membangun citra baik dimata masyarakat pada segmentasi tertentu dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas serta membangun basis massa pendukung.

Dari berbagai penelitian yang telah dibahas sebelumnya, belum peneliti temui hasil penelitian di bidang ilmu politik tentang relawan politik yang membahas secara mendetail mengenai relawan politik sebagai kekuatan politik baru dalam disinsentif terhadap politik kepartaian. Penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti yakini memiliki sesuatu yang baru (*novelty*) untuk dikaji lebih mendalam sebagai syarat suatu karya ilmiah, yakni sesuatu yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan karya tulis ilmiah kali ini, beberapa teori serta konsep yang digunakan untuk menganalisa permasalahan ini.

1.6.1 Relawan Politik, Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), dan Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Relawan adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi yang mengorganisir suatu kegiatan secara formal. Selain itu, kegiatan yang dilakukan relawan bersifat sukarela untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan (Schroeder, 1998).

Pemilu Presiden tahun 2014 dapat dikatakan sebagai momentum paling tepat untuk melihat signfikasi kehadiran relawan politik. Gerakan berbasis komunitas relawan pada umumnya lahir dengan inisiasi dari kelas menengah sebagai respon atas menurunnya kepercayaan publik terhadap pejabat publik (Jati, 2016).

Istilah relawan (*volunteer*) dalam historiografi politik dikembangkan semenjak tahun 1755 oleh seorang Perancis M. Fr Voluntaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang. Istilah relawan diambil dari bahasa Jerman "*aktivismus*" yang muncul pada akhir perang dunia pertama. Istilah ini kemudian digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Biasanya *aktivismus* dihubungkan dengan Kurt Hiller, pengarah organisasi *Neuer Club* yang menaungi para penyair ekspresionis awal, maupun Franz Pfemfert, pendiri majalah *Die Aktion* pada 1911 yang sangat politis. Dalam berbagai pengertian tersebut, kaum militan maupun

aktivismus akhirnya dapat dikatakan sebagai bagian dari relawan (*volunteer*) (Heryanto, 2019: 159).

Kehadiran relawan politik pada kontestasi Presidensial 2014 berbeda dengan sejarah awal kelahiran voluntaristik. Pada kontestasi Presidensial 2014, relawan politik bukan bagian dari anggota Partai Politik (Arianto, 2014).

Relawan politik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, relawan yang berasal dari mantan aktivis yang terlibat dalam pergerakan kisaran tahun 1900-an atau lebih dikenal sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi untuk menggulingkan rezim Soeharto. Kedua, relawan yang berasal dari aktivis berbagai organisasi non-pemerintah mulai dari gerakan anti-korupsi, petani dan kelompok masyarakat adat. Ketiga, adalah relawan yang berasal dari kelompok seniman dan orang-orang di sektor kreatif. Kelompok pertama dan kedua memiliki agenda politik, namun tidak memiliki massa yang jelas. Berbeda dengan kelompok ketiga yang tidak memiliki agenda politik tetapi memiliki banyak jejaring massa dari semua lapisan masyarakat (Savirani, 2015).

Selain itu, voluntarisme politik dapat diartikan sebagai kerja advokasi yang dilakukan oleh masyarakat marjinal dalam mengadvokasi kepentingan mereka terhadap Negara (Wilson, 2007 : 335). Orientasi voluntarisme politik bukanlah mengarahkan pada perubahan sosial maupun juga pengawasan kekuasaan, namun lebih kepada redistribusi *public goods* sesama warga Negara. Masyarakat lebih berperan sebagai kelompok kepentingan terhadap relasinya dengan Negara untuk

memastikan Negara berfungsi sebagai penjamin atas pelayanan publik dan juga *public goods* (Jati, 2016).

Dengan melihat orientasi dari terbentuknya relawan politik sebagai bentuk dorongan publik untuk memastikan Negara sebagai penjamin atas pelayanan publik maka relawan politik dapat pula dikategorikan sebagai kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan mengandung arti sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan (Surbakti, 1992: 109). Kelompok kepentingan juga diartikan organisasi yang berusaha mempengaruhi suatu kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (Budiardjo, 2008: 383).

Kelompok kepentingan seringkali di definisikan sebagai “*a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interest* (Benditt, 1975: 34). Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry & Goldman, 1997). Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, diantaranya :

Pertama, kelompok anomik yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat komunikasi politik yang rendah, ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Contohnya : Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur, Warga penghuni Kalijodo, dan sejenisnya.

Kedua, kelompok non-assosiasional yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial. Contohnya : Trah Keluarga Mangkunegara, Ikatan Alumni Undip, Alumni Pendidikan Lemhannas, dan lain-lain.

Ketiga, kelompok institusional merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, memiliki kegiatan rutin, jaringan organisasi yang kuat serta keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini menduduki posisi-posisi yang sangat penting sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengambilan suatu kebijakan. Contohnya : Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain-lain.

Keempat, kelompok assosiasional merupakan kelompok kepentingan yang memiliki organisasi secara formal dan terorganisir secara baik dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari suatu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang

tertentu yang menjadi fokusnya. Contohnya : Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan lain-lain.

Dari keempat kelompok kepentingan di atas, kelompok institusional dan kelompok asosiasi dianggap yang paling efektif dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta lebih memiliki kemungkinan yang besar dalam memperoleh dukungan dari masyarakat.

Dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah kelompok kepentingan biasanya menempuh dua langkah, diantaranya : Pertama, mereka menyampaikan isu-isu yang sudah diartikulasikan sedemikian rupa untuk “dibeli” Partai Politik. Langkah ini biasanya ditempuh jika sistem politik yang ada berjalan secara demokratis dan terbuka, dimana partai-partai politik bersaing secara sehat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik lebih tinggi dibandingkan kelompok kepentingan. Kedua, kelompok kepentingan langsung menyampaikan aspirasi yang sudah diartikulasikan kepada pemerintah. Proses ini biasanya didahului oleh adanya polemik yang luas dalam masyarakat. Terkadang sejumlah anggota kelompok kepentingan dengan sengaja meledakkan satu isu tertentu ke media massa agar menjadi perhatian umum, sehingga pemerintah turut perhatian. Mekanisme ini ditempuh ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik rendah (Jordan dan Malanoey, 2007: 39-40).

Kedudukan kelompok kepentingan dalam sistem politik adalah terletak di antara pemerintah dengan masyarakat. Posisinya berada di tengah, sebagai

jembatan yang menghubungkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat dan pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan akan mengalami distorsi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, jika tanpa ada keseimbangan dinamis dari unsur-unsur dalam masyarakat. Adanya kelompok kepentingan merupakan sesuatu yang baik dalam sistem politik (Hays, 2011: 117-118).

Implikasi dari terbentuknya relawan politik di ranah publik tidak hanya memicu publik untuk menguatkan dirinya sebagai *demos* untuk mengartikulasikan dirinya sebagai kelompok kepentingan melainkan sekaligus sebagai kelompok penekan secara bersamaan (Jati, 2016). Kelompok penekan adalah kelompok yang melakukan tekanan/kritikan atas kekuasaan yang sedang berjalan. Kelompok ini bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan, tetapi tidak langsung mengambil bagian dalam kekuasaan tersebut (Duverger, 1984). Perbedaan kelompok penekan dengan kelompok kepentingan terletak pada cara dan sasaran, kelompok penekan memakai cara memberikan tekanan hingga paksaan sampai tuntutananya terpenuhi (Surbakti, 1992: 109).

Kelompok penekan juga dapat didefinisikan sebagai “*an association of individuals whose main objective is to influence government in a manner favorable to the interest of its members. Unlike political parties, a pressure group has not interest in becoming the government. Rather, pressure groups are organised groups seeking to achieve defined goals*”. Kelompok penekan sebagai sebuah asosiasi individu yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara yang menguntungkan untuk kepentingan anggotanya.

Tidak seperti partai politik, kelompok penekan belum tertarik untuk menjadi pemerintah. Sebaliknya, kelompok penekan adalah kelompok terorganisir berusaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Akinbade, 2008: 210).

1.6.2 Persamaan dan Perbedaan Kelompok Kepentingan (*Interest Group*) dan Partai Politik dalam Sistem Politik

David Easton mengajukan definisi tentang sistem politik yang terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut. Pertama, *the political system values (by means of politics)*. Artinya, sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijakan). Kedua, *its allocation are authoritative*. Artinya, penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan. Ketiga, *its authoritative allocations are binding on the society as a whole*. Artinya, penetapan yang bersifat paksaan akan mengikat masyarakat secara keseluruhan (Sukarna, 1997: 16-17).

Berdasarkan definisi tersebut, sistem politik memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, pola yang tetap dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik berupa supra struktur politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun infrastruktur politik (Partai Politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik). Kedua, kebijakan yang mencakup pembagian dan pendistribusian barang-barang materiil dan immaterial untuk menjamin kesejahteraan. Dengan kata lain, membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai Negara secara mengikat. Ketiga, penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan

fisik secara legal. Keempat, fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar (Komara, 2015).

Gambar 1.1 Alur Kerja Sitem Politik



Sumber : Easton, 1992

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah *input*, konversi (proses), *output*, *feedback*, dan lingkungan (Easton, 1992: 193-195). Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya *input* yang berupa tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) yang kemudian dilanjutkan dengan konversi untuk diakhiri menjadi *output*, yaitu berupa keputusan atau kebijakan. Konversi ini ibarat sebuah *black box* mengingat tidak banyak publik yang mengetahui proses yang terjadi di dalamnya. Setelah menjadi *output*, ada umpan balik (*feedback*) melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi *input* (Darmawan, et al., 2018).

Didalam sistem politik posisi antara kelompok kepentingan dan Partai Politik memiliki kesamaan, keduanya akan terlibat dalam proses *input* hingga proses konversi untuk memastikan *ouput* apa yang akan dihasilkan. Proses konversi akan melibatkan supra struktur politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

maupun infrastruktur politik (Partai Politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik) semuanya berinteraksi dalam sebuah wadah sistem politik (Komara, 2015). Menurut Nico Schulte Nordholt (Juliansyah, 2013: 47), kekuatan sistem politik memerlukan tingkat dukungan yang tinggi dari berbagai peran yang ada di dalam sistem politik.

Kelompok kepentingan merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry & Goldman, 1997). Tujuan kelompok kepentingan hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Berbeda dengan kelompok kepentingan, Partai Politik memiliki peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Banyak yang berpendapat bahwa Partai Politik yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattschneider (1942) "*political parties created democracy*". Partai Politik merupakan pilar yang sangat penting untuk di perkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis (Schattschneider, 1975).

Pengertian Partai Politik semacam itu sesuai dengan pemikiran Jhon Stuart Mill (2005), yang mengatakan pentingnya Partai Politik bagi masyarakat untuk menentukan atau menempatkan wakilnya sendiri sebagai pejabat Negara yang dapat diberhentikan menurut kepentingan masyarakat. Untuk menjalankan hal

tersebut akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama melalui suatu partai.

K.C. Wheare (1951) juga memiliki argumen yang sama, dengan mengatakan bahwa Partai Politik hakikatnya merupakan cara bagaimana agar rakyat dapat mengawasi atau terlibat dalam pemerintahan dengan cara mengorganisir dirinya sendiri. Pengorganisasian ini didasarkan pada persamaan pandangan ideologi, kepentingan ekonomi, sosial dan lain-lain. Akan tetapi, yang lebih penting dalam berorganisasi pada suatu Partai Politik adalah kesamaan keinginan untuk mempertahankan atau merebut kedudukan atau kekuasaan politik.

Pada umumnya, para ilmuwan politik menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi Partai Politik. Keempat fungsi Partai Politik tersebut menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik, (iii) rekrutmen politik, dan pengatur konflik (Budiardjo, 2008). Yves Meny dan Andrew Knapp (1968: 86) juga menjabarkan keempat fungsi Partai Politik, keempat fungsi Partai Politik itu mencakupi fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, (iii) sarana rekrutmen politik, dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Melihat dari salah satu fungsi Partai Politik yang dijelaskan oleh para ilmuwan yakni sebagai sarana rekrutmen politik. Menjelaskan bahwa Partai Politik dibentuk untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin Negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Tentu tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan Partai Politik sebagai sarana

rekrutmen politik. Jabatan-jabatan professional di bidang-bidang kepegawainegerian dan yang tidak bersifat politik tidak boleh melibatkan peran Partai Politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik. Untuk menghindari pecampuradukan, perlu di mengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan politik dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya ada satu jabatan yang bersifat politik, yaitu Menteri (Asshiddiqie, 2006).

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Kekuatan Politik Baru

Gerakan non-partisan oleh kelompok kepentingan yang secara spontan berubah menjadi relawan politik mampu mendorong perubahan dari luar sistem politik formal yang selama ini belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Gerakan sosial non-partisan telah mampu menumbangkan oligarkis Partai Politik yang sekaligus membangun demokrasi partisipatoris.

1.7.2 Relawan Politik

Relawan politik merupakan manifestasi dari keterlibatan kelompok warga dalam aktivitas politik di ruang publik untuk memberikan dukungan terhadap figur politik yang hendak maju dalam kontestasi elektoral. Objek dari relawan politik penelitian ini adalah Pro-Jo, Pro-Jo merupakan kelompok relawan yang tidak membubarkan diri pasca kontestasi Presidensial 2014 dan memilih

mengubah status organisasinya menjadi organisasi massa (Ormas). Relawan yang mampu mengantarkan elitnya untuk menduduki kursi Menteri.

Berdasarkan berbagai konsep atau pengertian di atas maka fenomena Pro-Jo (Pro Jokowi) sebagai kekuatan politik baru akan dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a) Aktivitas sebelum dan pada saat kontestasi Presidensial :
 1. Penggalangan massa
 2. Penggalangan dana
 3. Penggalangan isu
- b) Aktivitas sesudah kontestasi Presidensial dan dalam masa pemerintahan Jokowi :
 1. Rekrutmen jabatan publik
 2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan publik

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Studi kasus eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif dipilih karena kekuatan dari studi kasus eksplanatoris dapat mengeksplorasi data-data yang diperoleh untuk menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam (Creswell, 1998). Perpaduan studi kasus eksplanatoris dan pendekatan kualitatif digunakan peneliti sebagai katalisator untuk menguji hipotesis pada penelitian ini dan akan menjadi

panduan dalam mengeksplorasi adanya perkembangan relawan politik menjadi kekuatan politik baru pada kontestasi presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019.

1.8.2 Ruang Lingkup/Fokus

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tema dan judul, maka subjek utama untuk dilakukan wawancara ialah Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Pusat Pro-Jo, dan beberapa narasumber yang dianggap dapat mendukung isi dan hasil penelitian kali ini.

1.8.3 Fenomena Penelitian

Secara disiplin keilmuan, fenomenologi mempelajari tatanan atau struktur pengalaman dan kesadaran seseorang. Secara harfiah, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita bisa ambil dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena yang dialami, akan tetapi terfokus pada pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung (Kuswarno, 2009: 22).

Kuswarno (2009: 36), lebih lanjut menjelaskan mengenai penggambaran sifat dasar dari penelitian kualitatif yang relevan dan akurat sehingga menggambarkan posisi metodologis fenomenologi dan yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif : (1) Mencari lebih dalam nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia, (2) Penelitian terfokus pada satu tujuan dan keseluruhan, (3) Tujuan

penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman yang dialami informan, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas, (4) Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, (5) Data yang diperoleh berbentuk deskriptif dan penjabaran adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia, (6) Pertanyaan yang dibuat mencerminkan kepentingan dalam keterlibatan dan komitmen dari peneliti, (7) Adanya pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun antar bagian dari keseluruhan.

Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas dan lebih terperinci berdasarkan fenomena yang dialami informan mengenai bagaimana relawan politik sebagai sebuah kekuatan politik baru. Seberapa pentingkah relawan politik hadir sebagai institusi demokrasi alternatif. Bagaimana dampaknya bagi praktik demokrasi di Indonesia. Apakah relawan politik merupakan kekuatan politik baru.

Peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang dialami oleh informan.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang tidak berbentuk angka, biasanya berupa uraian dan

informasi yang berisi keterangan-keterangan terkait dengan penelitian. Sumber data penelitian berasal dari data penelitian yang diperoleh. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Sumber Data Primer, Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber primer, yakni informan utama atau narasumber.

Data primer ialah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2009). Sumber data primer diperoleh melalui proses wawancara maupun penyebaran kuesioner kepada informan. Informan adalah orang yang diminta keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, dan keterangan yang diperoleh dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau lisan maupun saat menjawab wawancara.

Informan dalam penelitian ini Sekretaris Jendral Pro-Jo, Dewan Pimpinan Pusat Pro-Jo, dan Akademisi atau Pengamat Politik yang memiliki kemampuan dalam memahami topik penelitian ini.

(2) Sumber Data Sekunder, Tidak hanya lisan maupun tulisan dari para informan yang termasuk ke dalam data primer, tambahan seperti dokumen juga merupakan sumber data. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah AD ART Pro-Jo, beberapa literasi seperti jurnal, artikel dan tulisan-tulisan di internet lainnya, yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian kali ini.

1.8.5 Pemilihan Informan

Informan merupakan salah satu unsur paling penting dalam penelitian kualitatif. Informan dikategorikan ke dalam sumber data primer, sehingga diharap dapat memberikan banyak informasi maupun data, yang berkenaan dengan penelitian ini. Beberapa informan yang dijadikan ke dalam sumber data dalam penelitian kali ini, akan dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian

NO	INFORMAN	RUMUSAN MASALAH	METODE
1	Sekretaris Jendral Pro-Jo Handoko	Menerangkan dan menganalisis relawan politik sebagai kekuatan politik baru	Wawancara Mendalam
2	Eks. Ketua DPD Pro-Jo Jawa Tengah Ayub Purnomo	Menerangkan dan menganalisis relawan politik sebagai kekuatan politik baru	Wawancara Mendalam
3	Peneliti CSIS / Dekan FISIP UNTIRTA Leo Agustino	Menerangkan dan menganalisis relawan politik sebagai kekuatan politik baru	Wawancara Mendalam
4	Direktur Eksekutif Algoritma Research & Consulting Aditya Perdana	Menerangkan dan menganalisis relawan politik sebagai kekuatan politik baru dalam konteks disinsentif politik kepartaian	Wawancara Mendalam
5	Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Dian Permata	Menerangkan dan menganalisis relawan politik sebagai kekuatan politik baru dalam konteks disinsentif politik kepartaian	Wawancara Mendalam
6	Kompas TV Yogi Arief Nugraha	Menerangkan dan menganalisis relawan politik sebagai kekuatan politik baru dalam konteks disinsentif politik kepartaian	Wawancara Mendalam
7	Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto	Menerangkan dan menganalisis relawan politik sebagai kekuatan politik baru dalam konteks disinsentif politik kepartaian	Wawancara Mendalam

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, sumber data dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian kali ini antara lain :

1. Wawancara

Macam-macam wawancara dalam penelitian ini ada tiga yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti lebih memilih wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara dalam penelitian ini akan ditujukan kepada para informan, yang telah dijabarkan dalam penjelasan pemilihan informan di atas. Yakni sumber data primer seperti Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Pusat Pro-Jo, dan Akademisi atau Pengamat Politik yang memiliki kemampuan dalam memahami topik penelitian ini.

Sedangkan yang termasuk ke dalam sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Data dapat diambil dari buku, kamus, artikel/tulisan, atau data yang dapat diakses dari internet, serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 335).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.